

“Tema: 6 (Rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

**POLITIK ANGGARAN DAN LITERASI KEUANGAN WARGA
MISKIN
AFFIRMATIVE POLICY MODEL DALAM KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh

Luthfi Makhasin, Andi Ali Said Akbar, Ahmad Sabiq

ABSTRAK

This research deals with two different but related topics, financial literacy and its effect in improving capacity to access information and banking services and budget policy and government capacity to intervene and protect migrant worker in Banyumas. Most of researcher and policy maker consider problems and vulnerability faced by migrant worker derive from lack of supervising and coordinating capacities of the government's agencies and that of personal capacity of prospective migrant workers due to educational and socio-economic backgrounds. Different from most of scholarly studies on migrant workers, this research assumes that the lack of financial literacy and the absence of government's budget affirmative policy are roots of the problem. The lack of financial literacy has to do with personal capacity to access information and services while the absence of affirmative policy relates to structural and financial constraints faced by the government to intervene and protect migrant worker. Both problems are directly responsible for ongoing exploitation faced by those working overseas. This research finds out that while migrant workers contributes significantly to boost domestic economy through remittance on the one hand and deal with unemployment problems on the other, most of migrant worker still relies on high interest debt and rent seeking practices. Though the government currently provides low interest credit program accessible to prospective migrant worker, this research shows that most problems faced by migrant workers in particular and employment problems in general have to be addressed through citizen's and private sector's initiatives rather than government interference.

Keywords: *migrant worker, affirmative policy, budget, financial literacy, employment*

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan adalah salah satu isu kebijakan sosial yang selalu menarik perhatian banyak minat studi kesarjanaan. Di masa rezim Orde Baru (1967-1998), studi kesarjanaan tentang ketenagakerjaan dan perburuhan memberikan ruang pembahasan yang memadai bukan saja pada aspek buruh/tenaga kerja sebagai aktor penting gerakan sosial tapi juga bagaimana perburuhan/ketenagakerjaan merupakan domain kebijakan strategis yang melibatkan hubungan

segitiga yang dinamis antara pekerja, serikat pekerja dan pemerintah. Isu ketenagakerjaan oleh karenanya juga terkait dengan konteks struktural arah kebijakan industrialisasi negara dan rezim ekonomi internasional serta respon agensi populer seperti gerakan pekerja merespon konteks struktural itu (Hadiz, 1997; Ford, 2009).

Dari banyak studi kesarjanaan tentang ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat cukup banyak studi yang memberi perhatian pada isu pekerja migran atau mereka yang bekerja di luar negeri. Seiring dengan integrasi ekonomi Indonesia dalam pasar kerja global, Indonesia menjadi salah satu negara sumber pekerja migran penting di Asia (Hugo, 1995:275-298). Beberapa studi tentang pekerja migran memberi perhatian pada aspek historis pekerja migran di Indonesia (Hugo, 2006:53-92) pengorganisasian gerakan (Ford, 2004:99-119), pentingnya akses informasi bagi keputusan untuk bekerja di luar negeri (Hugo, 2003:439-467), pentingnya jejaring sosial pekerja migran (Christinawati et.al, 2013:95-116), dan agensi pekerja dalam menentukan otonomi dirinya (Nurchayati, 2011:479-502). Meskipun memberi sumbangan penting bagi kajian tentang pekerja migran, kajian yang ada sejauh ini cenderung mengabaikan kondisi awal pekerja migran di tempat asal yang rawan eksploitasi dan minimnya intervensi pemerintah untuk mengatasi hal ini.

Menurut riset terdahulu yang dilakukan oleh Tyas, dkk (2014), persoalan migrasi dilatarbelakangi beberapa alasan; pertama, lebih banyak dilakukan karena faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan jeratan hutang. Kedua; alasan perceraian. Ketiga, tergiur iming-iming dan bujuk rayu para calo tenaga kerja dengan janji mempekerjakan di tempat bagus dengan gaji tinggi. Beberapa alasan ini membuat migrasi memiliki kerentanan yakni latar belakang pendidikan, status, hingga kondisi ekonomi. Ada fakta yang tidak bisa dihindari selama ini bahwa sebagian besar buruh migran Indonesia adalah perempuan dan bekerja di sektor domestik. Hingga tahun 2013, tercatat bahwa buruh migran perempuan yang berdokumen resmi dan tercatat lebih banyak dibanding buruh migran laki-laki. Tahun 2010 misalnya dari total BMI terdiri dari 78% perempuan dan 22% laki-laki. Kuat dugaan apabila hitungan tersebut juga menyertakan BMI yang tidak berdokumen resmi, maka akan semakin banyak buruh migran perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Kerentanan berikutnya adalah rendahnya rata-rata pendidikan terakhir yang diikuti BMI. Tingkat pendidikan rata-rata pekerja migran Indonesia ada pada tingkat SD dan SMP. Sebuah bekal yang masih prematur ketika harus dihadapkan pada keras dan asingnya lingkungan kerja di luar negeri. Rendahnya pendidikan ini juga yang berimplikasi pada kerentanan BMI ketika berinteraksi dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Belum lagi tingkat

adaptasi dengan pola kerja yang dihadapi di luar negeri. Ini kemudian yang juga mengakibatkan tingginya kasus penipuan dan perdagangan manusia. Sektor domestik memang menempati urutan tertinggi jenis pekerjaan BMI karena sektor inilah yang paling mudah diakses dari segi pendidikan dan menengah dan tidak membutuhkan ijazah keahlian lain.¹ Beberapa kerentanan tersebut menyebabkan migrasi menjadi tidak aman. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dan keluarga buruh migran tidak cukup memiliki pengetahuan tentang migrasi yang aman sehingga mereka mudah tergiur iming-iming uang dari sejumlah calo tenaga kerja Indonesia.

Banyaknya kasus yang dialami pekerja Indonesia di luar negeri menjadi diskursus penting dalam perumusan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Kebijakan yang berkembang selama ini masih didominasi logika pengaturan. Pemerintah menempatkan dirinya sebagai regulator. Dalam perannya sebagai regulator, perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah masih berfokus seputar perbaikan layanan dasar dan perbaikan kiat prosedural. Didalamnya termuat rangkaian aksi pengendalian, pengawasan dan pemberian hukuman. Pada aspek pengendalian, pemerintah telah merevisi berbagai aturan ketenagakerjaan yang lebih menjamin hak azasi tenaga kerja khususnya yang bekerja di luar negeri. Pada aspek pengawasan dan pemberian hukuman, pemerintah lebih selektif memberi ijin dan berani memberi sanksi kepada perusahaan penyalur tenaga kerja, majikan dan pelaku lainnya yang bertanggungjawab atas musibah dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh TKI kita.

Riset ini membangun kebaruan argumen bahwa sekalipun pemerintah telah memperbaiki kualitas pelayanan dan pengawasan penyaluran TKI itu bukan berarti dapat menghentikan praktek percaloan dan menghilangkan maraknya TKI illegal. Tingginya kasus percaloan dan besarnya angka pekerja illegal seringkali berangkat dari rendahnya pemahaman mereka tentang layanan keuangan (*financially illiterate*). Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi calo dan PJTKI illegal yang menyediakan kemudahan pinjaman bantuan modal untuk pergi ke luar negeri. Kebijakan perlindungan ketenagakerjaan secara khusus dan anggaran pada umumnya belum menyentuh persoalan mendasar yang melahirkan praktik percaloan dan TKI illegal.

Belum banyak kajian yang menguji seberapa besar pengaruh resep solusi tersebut menyentuh akar masalah. Penelitian ini ingin menjawab tiga rumusan pertanyaan yang saling terkait berikut ini, bagaimana tingkat literasi keuangan warga desa miskin berkontribusi bagi kerentanan mereka terhadap praktek percaloan dan PJTKI illegal? bagaimana kapasitas afirmasi

¹http://www.academia.edu/10628398/Perlindungan_Sosial_Social_Protection_untuk_Buruh

politik anggaran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mensubsidi dan melindungi warganya dari praktek percaloan tenaga kerja keluar negeri dan PJTKI ilegal? dan bagaimana formula literasi keuangan dan model kebijakan afirmasi anggaran bagi perlindungan calon tenaga kerja Kabupaten Banyumas?

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi. Data dianalisis melalui model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

KERANGKA DAN PENDEKATAN TEORETIK

Teori Kebijakan Publik Model Rasionalisme

Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan public sebagai maximum social gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini dikembangkan dari model cost-benefit analysis, sebuah model yang diawali di US Corps and Engines (semacam Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1930-an dalam rangka membangun bendungan dan jembatan. Tidak dipungkiri, model ini adalah model yang paling banyak diikuti dalam praktik formulasi kebijakan public di seluruh dunia.

Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanandan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Cara-cara formulasi kebijakan disusun dalam urutan berikut:²

Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya.

Menemukan pilihan-pilihan.

Menilai konsekuensi masing-masing pilihan.

Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan.

Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Apabila dirunut, kebijakan ini merupakan model ideal dalam formulasi kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisien dan efektifitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya menfokuskan pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan.

² Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Gramedia, Jakarta. 2006. Hal. 82-85

Dengan demikian, idealisme dari model rasional ini perlu diperkuat dan ditingkatkan karena di sepanjang sejarah kenegaraan, selalu ada negarawan-negarawan dan birokrat-birokrat professional yang mengabdikan diri secara tulus pada kemajuan bangsanya daripada sekadar mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, model rasional ini perlu menjadi kajian dalam proses formulasi kebijakan. Modelnya sendiri dapat dilihat pada gambar di halaman berikut:³

Teori ini akan digunakan sebagai metode analisis kebijakan afirmasi anggaran bagi peningkatan perlindungan TKI Kab. Banyumas dari praktek penyaluran tenaga kerja yang eksploitatif dan illegal. Mempelajari selukbeluk program afirmasi anggaran, organisasi program, pilihan-pilihan perbaikan yang realistis dijalankan pemerintah hingga menemukan formula yang lebih tepat dan aplikatif. Dengan metode analisis ini maka data yang terkumpul melalui metode riset PRA yang berbasis pada partisipasi warga dan pemerintah dapat tersusun secara terukur dan sistematis.

Teori Politik Anggaran

Pemerintah sebagai actor dalam pandangan perspektif kesejahteraan klasik (classical welfare perspective) menjelaskan posisi penting peran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kewenangan regulasi yang dimilikinya. Regulasi ini berguna untuk mengatur proses pengalokasian sumberdaya yang memungkinkan tercapainya nilai pemerataan dan efisiensi. Melalui keputusan-keputusan badan-badan pemerintah atau lembaga-lembaga perwakilan, pemerintah berwenang mengatur pengadaan barang atau pelayanan yang ditentukan⁴

Ruh dari kapasitas pemerintah melakukan fungsi distribusi sumberdaya berasal dari kepemilikan sumberdaya anggaran. Anggaran merupakan kebijakan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Melalui kebijakan anggaran, para pembuat keputusan bisa mengarahkan perilaku para pelaksana kebijakan. Dengan kebijakan anggaran pula, bisa dievaluasi kinerja dari para pelaksana kebijakan. Dengan posisinya yang sangat menentukan, perumusan kebijakan anggaran merupakan proses politik yang menentukan. Kebijakan anggaran merupakan kebijakan alokasi sumberdaya pemerintahan kepada komponen-komponen dalam masyarakat, dan bahkan pula komponen-komponen dalam organisasi pemerintahan. Setiap kebijakan anggaran selalu ada yang diuntungkan, namun ada

³ Ibid. 88

⁴ Dr. Pratikno, M. Soc.Sc, Dr. Purwo Santoso, MA dkk. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM Bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jogja Global Media. Yogyakarta. 2004. Hal. 177*

pihak lain yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, di setiap proses perumusan anggaran, selalu terdapat kompetisi antar aktor untuk mempengaruhi substansi kebijakan anggaran⁵

Sebagai sebuah proses politik, kebijakan anggaran melibatkan banyak pelaku. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan anggaran disebut sebagai partisipasi. Perumusan anggaran yang melibatkan partisipasi masyarakat biasa disebut sebagai Participatory Budgeting. Namun, proses partisipasi ini pada akhirnya menyerahkan proses finalnya di lembaga pemutus anggaran, yaitu untuk Kabupaten adalah DPRD dan Bupati. Oleh karena itu, proses politiknya bukan saja antara masyarakat dengan pemerintah termasuk DPRD, namun juga antar komponen-komponen dalam DPRD dan Eksekutif.⁶

Pertama, APBD merupakan kebijakan politik paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sekaligus menentukan orientasi ideologis dari otoritas politik lokal. Karena, melalui kebijakan ini, para pembuat keputusan bisa melakukan alokasi sumberdaya keuangan negara. Dengan melalui APBD, para pembuat keputusan bisa menentukan siapa atau masyarakat yang mana yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Pengalokasian sumberdaya keuangan melalui APBD bukan saja terjadi pada sisi belanja saja, namun juga pada sisi pendapatan. Melalui dua sisi ini, para pembuat keputusan bisa menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Dalam sisi belanja, kelompok yang diuntungkan adalah mereka yang memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dari yang lainnya. Sementara itu, melalui sisi pendapatan, kelompok yang diuntungkan adalah yang dipungut lebih kecil dari yang sewajarnya. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan akan tergantung pada jenis kegiatan apa saja yang didanai serta seberapa besar dana yang dialokasikan. Dengan kata lain, APBD merupakan wujud kongkret dari orientasi kebijakan politik dari penyelenggara negara di daerah.⁷

Kedua, pada konteks kekinian, APBD juga merupakan hasil akhir pertarungan ekonomi-politik yang terjadi dalam arena politik lokal. Pertarungan tidak hanya melibatkan kalangan birokrasi, politisi, melainkan juga menyentuh peran-peran yang dimainkan pengusaha-klien (rekanan birokrasi) dalam formulasi APBD. Selain itu, APBD juga menunjukkan posisi tawar

⁵Makalah Prof. Pratikno. Fisipol UGM. PROSES POLITIK PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH Lokakarya DPRD Kab Banjarnegara 14 April 2003.

⁶Ibid.

⁷Makalah AA.GN. Ari Dwipayana. Fisipol UGM. POLITIK ANGGARAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Disampaikan dalam diskusi Mengkritisi RAPBD Propinsi DIY Tahun 2002, yang diselenggarakan oleh Jaringan Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (JANGKEP), Di Wisma Kagama, Senin, 22 April 2002

yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.⁸ Seperti diketahui bersama, konstelasi politik di daerah paska 1998 mengalami perubahan yang cukup substantif. Kebijakan desentralisasi yang mulai berlaku efektif Januari tahun 2001 berjalan bersamaan dengan proses demokratisasi. Dengan dikeluarkannya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang no. 4 tahun 1999 tentang Pemilu, maka locus politik dan pembuatan keputusan akan bergeser dari Jakarta ke daerah-daerah. Pemberian otonomi yang lebih besar pada daerah seperti yang dimaksud dalam UU no. 22 tahun 1999 mengandung makna *distribution of power* dimana daerah mempunyai keleluasaan untuk membuat keputusan-keputusan politik tanpa harus diintervensi oleh pemerintah pusat, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Keleluasaan yang semakin besar ini mengundang pergeseran arena pergulatan politik dari tingkat nasional ke daerah.⁹

Apa yang penting diingat ketika hendak mendiskusikan sebuah system jaminan social suatu Negara? Pertama, kewajiban Negara (*state obligation*) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik pada berbagai kebutuhan dasar manusia (terutama makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan). Kedua, jaminan social berbicara tentang proteksi Negara bagi warga terhadap kondisi-kondisi yang potensial mendegradasi harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, usia lanjut, cacat, dan pengangguran.¹⁰

Di banyak Negara, terutama Negara-negara yang menganut system Negara kesejahteraan (*welfare state*), system jaminan social yang baik dimaknai sebagai titik sentral makna eksistensi Negara. Negara ada untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan rakyat demi prestise Negara. Tidak jarang, pemaknaan dan implementasi ide jaminan social di suatu negara menjadi indikator terpilih atau tidaknya kabinet untuk memimpin pemerintahan dimasa yang akan datang. Itu sebabnya, kebanyakan pemerintah negara-negara beradab memaknai pelaksanaan jaminan sosial. Representasi dari semua lapisan masyarakat, terutama kaum buruh dan angkatan kerja, betul-betul dieprhatikan suaranya dalam memutuskan kebijakan jaminan social. Sebagai contoh di Australia terdapat Jaminan Keuangan bagi orang-orang dengan usia kerja. Tunjangan bagi penganggur: tidak bekerja, sedang mencari kerja, bersiap untuk menerima pekerjaan dan

⁸Dalam konteks ini akan sangat relevan untuk membicarakan partisipasi publik dalam penyusunan APBD. Kealfaan dalam membangun partisipasi publik inilah yang menyebabkan APBD yang disusun hanya mengakomodasi kepentingan elite politik-birokrasi yang terbatas. Akhirnya, APBD menjadi tidak transparan, dan tidak akuntabel.

⁹Ibid.

¹⁰Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial: Tiga Pilar Jaminan Sosial di Austalia dan Indonesia*. Trade Union Rights Centre (TURC). Jakarta. 2006. Hal. 1

memenuhi kriteria sedang melakukan aktifitas tertentu (biasanya mencari pekerjaan) setiap 2 minggu.¹¹

Teori ini digunakan untuk membangun kerangka pemerintah sebagai aktor utama yang dapat melakukan fungsi distribusi anggaran bagi kesejahteraan khususnya pada isu perlindungan ketenagakerjaan. Lapis pertama jaminan dan afirmasi social dipegang oleh pemerintah tanpa menutup peran actor swasta. Mengingat dalam riset ini membangun asumsi gap policy masih terdapat ditubuh pemerintah sendiri maka focus analisis menitikberatkan pada kapasitas distributive pemerintah sendiri sebagai pilar pokok kesejahteraan warganya.

Teori Migrasi

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkuat pada sekitar wilayah satu negara saja. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi intern dianggap sebagai migrasi alami dimana surplus tenaga kerja sedikit demi sedikit ditarik dari sector pedesaan untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pertumbuhan industry di perkotaan. Proses tersebut dianggap menguntungkan secara social karena sumberdaya manusia sedang berpindah dari tempat yang produk marginal sosialnya (social marginal product) krap diasumsikan nol ketempat yang produk marginalnya bukan hanya positif tetapi juga terus tumbuh secara cepat berkat adanya akumulasi modal dan perkembangan teknologi.¹²

Migrasi dan Mencari Pekerjaan

Pengembangan gagasan bahwa kaum migran dapat terserap dalam ekonomi kota melalui sektor informal memungkinkan perincian tentang suatu fungsi (rumus) migrasi dengan menggunakan parameter sebagai berikut: Kemungkinan memperoleh pekerjaan tetap dalam

¹¹Ibid. 1-2.

¹²Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 Edisi 4. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1994. Hal. 271

sektor formal Kemungkinan memperoleh pekerjaan harian di sektor informal Tingkat upah dalam sektor formal ditentukan secara kelembagaan Penghasilan rata-rata dalam sektor informal ditentukan oleh pemerintah dan persediaan tenaga kerja dalam sektor "informal" Migrasi desa-kota perpindahan penduduk dari desa ke kota yang merupakan suatu faktor utama yang mendorong pesatnya pertumbuhan kota-kota di negara sedang berkembang.¹³

Teori yang berorientasikan pada ekonomi neoklasik (neoclassical economics) misalnya, baik secara makro maupun mikro, lebih menitikberatkan pada perbedaan upah dan kondisi kerja antardaerah atau antarnegara, serta biaya, dalam keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum.

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi (new economics of migration) beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja Migran dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri di Banyumas

Menurut data BPS, total angkatan kerja Indonesia pada tahun 2018 sebesar 133,9 juta orang. Dari jumlah ini, 127,1 juta orang terserap bekerja di berbagai sektor di dalam negeri. Dengan pertumbuhan angkatan kerja baru lebih dari 2 juta/tahun dan keterbatasan struktural pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, Indonesia menghadapi masalah tingginya angka pengangguran yang mencapai sekitar 7 juta/tahun dalam 5 tahun terakhir. Terbukanya peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri menjadi salah satu solusi mengatasi tingginya angka pengangguran ini.

¹³(Chris Maning dan Tadjuddin Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, Jakarta 1996. Hal.114)

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 2014-2018

Tahun/Juta Orang	2014	2015	2016	2017	2018
Tenaga Kerja	121,9	122,4	127,8	128,1	133,9
• Bekerja	114,6	114,8	120,8	121,0	127,1
• Menganggur	7,2	7,6	7,0	7,1	6,8

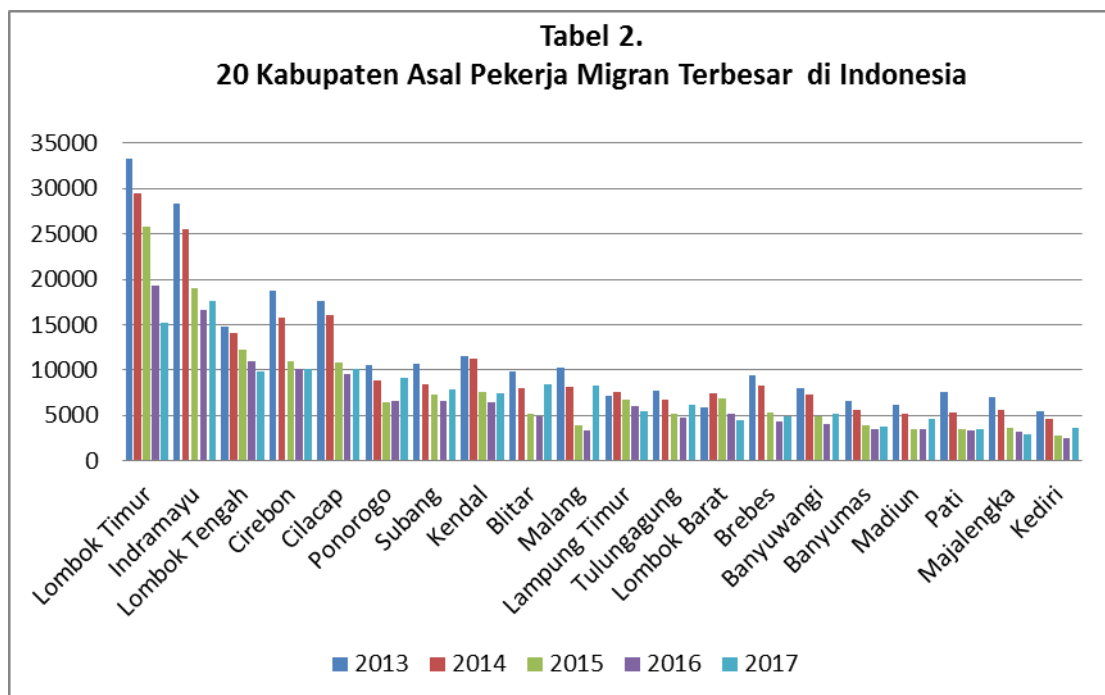
Sumber: Biro Pusat Statistik

Tidak seimbang nya pertumbuhan angkatan kerja dan pembukaan lapangan kerja di dalam negeri mendorong orang untuk pergi bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran. Menurut data BNP2TKI, antara tahun 2011 sampai dengan 2016, Indonesia mengirimkan rata-rata 400 ribu orang baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Tingginya mereka yang berangkat ke luar negeri setiap tahun diikuti oleh tingginya angka pekerja Indonesia yang mukim dan bekerja di luar negeri. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sejak tahun 2006 hingga Juni tahun 2012 misalnya, tercatat sebanyak 3.998.592 pekerja Indonesia bekerja di luar negeri dan 76,23% diantaranya adalah buruh migran perempuan. Data tersebut belum termasuk tenaga kerja yang ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi (undocumented migrant workers). Tingginya angka pekerja migran ini juga diikuti oleh tingginya angka pekerja migran yang bermasalah di luar negeri.

Data dari Pusat Latihan dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI misalnya mencatat bahwa selama tahun 2008, jumlah total permasalahan buruh migran Indonesia - dilihat dari pengaduan yang masuk - mencapai 45.626 kasus. Sedangkan pada tahun 2016-2017, jumlah pengaduan menurun menjadi sekitar 3000 aduan. Dari sekian banyak kasus aduan, kasus-kasus yang umum dialami oleh para TKI adalah gaji tidak dibayar, TKI gagal berangkat, melebihi ijin tinggal (*overstay*), pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, sakit, putus hubungan komunikasi, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, perdagangan orang, TKI tidak berdokumen, dan potongan gaji melebihi ketentuan. Sebagian besar korban adalah pekerja migran wanita.¹⁴

¹⁴Kasus yang muncul bervariasi dari mulai gaji tidak dibayar, penganiayaan, pelecehan seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, PT bermasalah, ketidaklengkapan dokumen, PHK sepihak sampai kepada kriminalitas, meninggal, ataupun gagal berangkat, bahkan kemungkinan tertular penyakit IMS dan

Banyumas adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang menyumbang jumlah buruh migran terbesar di Indonesia. Dari ratusan ribu orang yang pergi bekerja di luar negeri antara 2013-2017, terdapat 25 kabupaten yang menjadi daerah asal mayoritas pekerja migran. Bersama dengan Cilacap, Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah menjadi daerah asal pekerja migran terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013, Banyumas mengirimkan lebih dari 6500 pekerja migran. Jumlah ini menurun lumayan drastis antara tahun 2014-2015 sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 3764 orang pada tahun 2017.



Sumber: Data BNP2TKI diolah

Sebagaimana di daerah lain, fenomena TKI ilegal masih marak terjadi di Kabupaten Banyumas dan di daerah lainnya. Menurut hasil penelitian LSM Social Analysis and Research Institute (SARI), kebutuhan calon TKI berupa uang saku keberangkatan dan kecepatan pengurusan administrasi menjadi alasan bagi sebagian besar calon tenaga kerja Indonesia (TKI) memilih jasa calo atau biasa disebut sponsor. Penelitian ini menelisik tentang motif dibalik masih tingginya kepercayaan masyarakat menggunakan jasa calo TKI daripada menggunakan jalur legal yang disediakan oleh pemerintah. Hasil riset SARI menemukan bahwa sebanyak 68% TKI mengakui hal tersebut. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan TKI yang memilih

HIV/AIDS. Pada tahun 2007, laporan tahunan *Migrant Care* (2008) mencatat 206 buruh migran Indonesia yang meninggal di negara tujuan dan lebih dari separuhnya (55%) adalah perempuan.

mengurus keberangkatan melalui jalur perusahaan pengerah tenaga kerja resmi. Calon TKI melalui PJTKI hanya sebesar 48,7% sedang yang melalui pemerintah atau BNP2TKI bahkan lebih sedikit, hanya 19,9%. Ketua LSM SARI, Mulyadi memaparkan fakta di tiga kecamatan yakni Watumalang, Sukoharjo dan Leksono. Beberapa hal menarik seperti sumber memperoleh informasi pekerjaan luar negeri, alasan menjadi buruh migran, jenis kelamin sponsor dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan buruh, mengurangi buruh ilegal dan meningkatkan kapasitas pemerintah melayani calon buruh migran.¹⁵

Belajar dari riset ini maka kita dapat membangun argumen bahwa sekalipun pemerintah telah memperbaiki kualitas pelayanan dan pengawasan penyaluran TKI itu bukan berarti dapat menghentikan praktek TKI ilegal. Letak masalahnya adalah warga miskin yang ingin mengadu nasib di negeri orang bukan tidak mau patuh pada aturan. Mereka tetap memilih cara ilegal menjadi TKI karena tidak memiliki bantuan modal mengurus segala berkas dan syarat menjadi TKI. Tidak memiliki uang sebagai bekal menempuh perjalanan ke negeri orang. Faktor inilah yang kita identifikasi sebagai gap policy. Kesenjangan kebijakan yang belum disentuh oleh pemerintah. Pemerintah selayaknya memikirkan formula afirmatif memberi bantuan biaya pemberangkatan TKI. Pemerintah harus berperan lebih besar menutup gap policy Kerentanan biaya bagi keluarga miskin.

Ketika dikontekstualisasikan dengan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas maka hal serupa dapat ditemukan. Pemerintah daerah memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Menurunnya lowongan pekerjaan sedangkan pencari pekerjaan terus meningkat.

Spesifikasi lowongan pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan ketrampilan pencari pekerjaan.

Masih rendahnya perusahaan yang melaporkan berkaitan dengan jaminan tenaga kerja (Jamsostek, LK3, UMK, dll)

Masih terdapat calo/agen ilegal pemberangkatan TKI, sehingga sering terjadi permasalahan ketenagakerjaan / kasus CTKI atau TKI.¹⁶

Program masih banyak bernuansa formalitas dengan hanya melakukan banyak pelatihan. Tindakan lanjut pasca pelatihan seperti pemberian modal dan peralatan kerja masih

¹⁵Harian Banyumas, 24 September 2014. Lintas Daerah: TKI lebih percaya calo. Wonosobo.

¹⁶Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyumas Akhir Tahun Anggaran 2015 (LKPJ) Hal. IV. A.14 8.

mendapat anggaran sangat sedikit, itupun dengan serapan yang sangat rendah pula. Orang miskin, pengangguran selain tidak terlatih juga tidak memiliki modal usaha sehingga dua hal ini harus dikerjakan oleh pemerintah secara simultan bukan alternative.

Permasalahan tenaga kerja di Banyumas yang menjadi pekerja di Luar Negeri. Pemerintah juga bisa mengadopsi berbagai program inovatif di bidang buruh migran. Sekarang ini masyarakat membutuhkan inovasi basis migrasi buruh aman dengan cara subsidi biaya dan pemagangan. Terbukti bahwa regulasi yang hanya memaksa masyarakat menggunakan jalur legal menjadi TKI tidak efektif di lapangan. Persoalannya teletak pada tidak adanya subsidi pemerintah dalam menempuh penyaluran TKI aman tersebut. Kebijakan ini sudah sepadan dengan kontribusi TKI sebagai duta devisa negara. Remitensi yang cukup besar ketika mengirimkan uang ke daerah, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Coba kita bandingkan dengan dana remitensi TKI. Menurut Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslit FP BNP2TKI) jumlah dana remitensi pada tahun 2013 mencapai Rp. 451,51 Miliar.¹⁷ Berbanding terbalik dengan dukungan anggaran dinas ketenagakerjaan Pemkab Banyumas yang hanya mencapai Rp. 3 M.

Eksistensi peran regulator pemerintah masih dapat dipertanyakan efektifitasnya menyelesaikan masalah penyaluran tenaga kerja illegal. Peran regulator pemerintah juga tercermin dari elaborasi formula yang berkembang dikalangan organisasi masyarakat sipil. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nooryono, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Banyumas menyambut baik gagasan perbaikan tata kelola informasi yang disampaikan Infest, Pena Desa, dan Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan "Seruni" Banyumas (19/9/2014). Pertemuan tersebut juga membahas lima desa basis buruh migran (Dermaji, Gumelar, Paningkaban, Dawuhankulon, dan Dawuhanwetan) yang juga sudah menyatakan siap berkolaborasi terkait pengelolaan informasi buruh migran.

Dinsosnakertrans Banyumas menyatakan, pola sosialisasi penempatan dan perlindungan yang selama ini dilakukan, butuh diperbaiki dengan memanfaatkan ragam media dan teknologi. Data penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/PJTKI), data lowongan/rekrut (*job order*), dan informasi penting terkait penempatan dan perlindungan selama ini diakui belum terdistribusikan hingga ke desa basis TKI. Beberapa kegiatan kelola informasi yang akan direncanakan bersama-sama antara komunitas TKI seperti Seruni Banyumas, dengan desa-desa basis TKI dan Dinsosnakertrans antara lain, pembuatan

¹⁷ Satelit Post. Kamis 12 Juni 2014. Uang Kiriman TKI Capai Rp. 451,51 Milyar.

forum online/mailling list untuk media berbagi informasi dan dokumen, pertemuan koordinasi, diskusi kampung, siaran radio, perbaikan web Dinsosnakertrans, dan beberapa kegiatan lain.¹⁸

Anatomi Pembiayaan TKI

Kajian pokok dari riset ini adalah memahami anatomi pembiayaan buruh migran dan pengaruhnya terhadap kualitas penghidupan mereka saat bekerja. Isu ini penting dilatasi masih kuatnya kekuatan rentenir, calo dan pratek eksploitasi lainnya yang menimpa TKI saat merintis uapay mengadu nasib ke luar negeri. Sebagai warga miskin, menjadi TKI adalah jalan keluar dari kemelut ekonomi keluarga. Jalan keluar memperoleh pekerjaan layak disaat berkurangnya lapangan kerja di daerah sendiri.

Bekerja ke luar negeri memang tidak mudah karena tingginya biaya untuk keberangkatan dan penempatan kerja. Sebagai gambaran, biaya pemberangkatan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura berkisar antara Rp 5 juta dan Rp 15 juta. Sedangkan negara tujuan lain seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan lebih mahal lagi mencapai Rp 45 juta sampai dengan Rp 50 juta. Angka ini sungguh diluar kemampuan masyarakat miskin. Jangankan uang 40an juta. Untuk sekedar mencari pendapatan Rp. 500ribu tiap bulan saja termasuk sulit di daerah sendiri. Ditengah situasi serba sulit tersebut maka warga TKI akan mencoba berbagai cara memperoleh dana secara cepat, mudah sekalipun terikat perjanjian pinjaman yang membelenggu mimpi kesejahteraan mereka.

Dana tersebut diperuntukkan untuk banyak hal dari aspek administrative, akomodasi hingga pembekalan ketrampilan calon TKI. Dana tersebut dipergunakan mengurus administrasi seperti paspor, visa, rekening. Akomodasi seperti transportasi, penginapan, konsumsi. Pelatihan seperti bahasa, skill kerja, dan pelatihan spesifik lainnya sesuai rencana tempat kerja. Hal penting lain yang harus diketahui adalah calon TKI juga harus menyiapkan uang jaminan yang cukup besar kepada perusahaan penyalur TKI sebagai jaminan perusahaan. Dana ini berfungsi sebagai pengikat manakala TKI kabur atau tidak menepati komitmen kerja di majikan sehingga merugikan user dan perusahaan. Jumlah uang jaminan mencapai Rp.10-30 juta.

Literasi Keuangan Buruh Migran

Akumulasi anatomi pembiayaan yang berbentuk utang ini sangat memberatkan TKI. Sangat sedikit dari mereka yang mampu memenuhi biaya tersebut secara mandiri. Kadangkala calon pekerja migran harus menjual rumah, tanah, barang berharga miliknya untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Ketika dana besar tadi berbentuk utang maka proses

¹⁸ Pusat Sumber Daya. BURUH MIGRAN. www.buruhmigran.or.id. Dinsosnakertrans Banyumas Siap Perbaiki Tata Kelola Informasi Posted on 23 September 2014. Diakses tanggal 2 Oktober 2016

pengembaliannya sangat memberatkan TKI. Besaran cicilan dan waktu cicilan tergolong berat. Gambaran sederhana KUR dengan pinjaman Rp 25 juta bungga keseluruhan hingga lunas hanya Rp. 1,1 juta. Berbeda dengan pinjaman pada sponsor atau keluarga yang bungganya bisa mencapai Rp. 5-10 jt.

Sumber memperoleh pinjaman bagi warga miskin calon TKI tergolong konvensional. Mayoritas mereka mengandalkan model pinjaman nonperbankan seperti meminjam ke keluarga, tetangga. Kadang juga mereka menjual asset penting seperti tanah dan barang mewah. Pinjaman diikat dengan perjanjian yang sangat sederhana tapi memberatkan dimana TKI diharuskan menyepakati nilai pengembalian yang mencapai dua kali lipat dari jumlah pinjaman. Dalam keadaan terjepit otomatis TKI tidak memiliki pilhan selain mengikuti logika pemberi pinjaman tersebut.

Sumber pembiayaan selanjutnya adalah sepenuhnya mengandalkan biaya dari sponsor dan perusahaan penyalur. Artinya biaya rekrutmen, administrasi, pelatihan, penampungan, pemberangkatan semuanya ditanggung perusahaan. Banyaknya daftar biaya menyebabkan cicilan pinjaman TKI terhitung besar hingga menghabiskan hamper separuh gaji kerja TKI. Artinya jika TKI tersebut bekerja 2-3 tahun maka 14 bulan lamanya gaji dipotong membayar cicilan pinjaman. Hamper separuh masa kerja digunakan membayar utang. TKI harus mempersiapkan diri bekerja lebih lama dalam berbagai kondisi demi mendapatkan dana lebih hasil kerja agar dapat digunakan meningkatkan ekonomi keluarga.

Terkadang jeratan utang ini membuat TKI harus terus bertahan bekerja sekalipun keadaan tempat kerja tidak manusiawi atau bermasalah. TKI juga harus berangkat lebih dari 2 kali hingga mencapai puluhan tahun demi mengumpulkan gaji yang lebih banyak. Potongan gaji membuat mereka harus bekerja dalam masa yang lama di negeri orang demi mencapai tambahan dana yang lebih besar.

Sumber pembiayaan modern seperti bank dan progam subsidi pemerintah adalah model inovatif yang menjadi ide pemantik dari riset ini. Sumber pembiayaan modern ini belum banyak digunakan oleh TKI karena banyak factor. Akan tetapi faktor utama adalah masih minimnya inovasi afirmasi anggaran bagi TKI di daerah-daerah basis TKI serta belum populernya prosedur perbankan bagi warga. Sebenarnya pemerintah pusat sudah memiliki program afirmasi dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat tuk TKI (KUR TKI). Adapula afirmasi anggaran dari beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Pematang, Bali, Jembrana dan lain-lain. Seperti dikemukakan sebelumnya, kedua program tersebut belum populer dan menjangkau semua

daerah basis TKI. Termasuk kabupaten Banyumas yang belum memiliki program afirmasi anggaran bagi TKI.

Berbagai literature dan pemberitaan media elektronik juga menjelaskan jika KUR TKI pemerintah pusat disalurkan ke beberapa bank. Kadangkala tiap bank memiliki perbedaan standar administrasi yang memberatkan warga. Perbankan enggan mencairkan dana serta minimnya sosialisasi tentang KUR TKI. Kareanya masih ada beberapa kritikan terhadap program ini seperti menyamakan standar pemberkasan bagi peminjam dengan prinsip yang lebih mudah ditempuh oleh TKI terutama warga desa dan berpendidikan rendah. Sosialisasi program juga harus digalakkan tidak hanya oleh perbankan tapi juga oleh Pemda. Selanjutnya juga penting bagi kabupaten membuat terobosan afirmasi anggaran agar memberi kemudahan, keringanan biaya kepada warganya yang menjadi TKI, membantu perluasan cakupan bantuan pemerintah pusat serta memberi alternative bantuan yang mudah diakses.

Daya Tarik Calo/Sponsor TKI

Berangkat dari latarbelakang lemahnya metode pembiayaan modern bagi TKI menciptakan gap kebijakan yang dialami masyarakat. Disatu sisi terbelit utang besar jika berangkat menjadi TKI namun di daerah sendiri tidak ada system pembiayaan afirmatif dan kehidupan ekonomi yang masih miskin. Daya tarik calo/sponsor adalah prosedur yang mudah memperoleh dana dan pengurusan berbagai dokumen TKI yang kesemuanya dikerjakan oleh sponsor. TKI hanya mempersiapkan fisik dan keterampilan kemudian menunggu panggilan dari user yang telah dihubungi perusahaan. Karakteristik TKI yang mayoritas dari pedesaan dengan pendidikan rendah tentu merasa sangat terbantu dengan segala kemudahan tersebut.

Kapasitas Anggaran Perlindungan Buruh Migran

Dengan jumlah buruh migran dan angka remitansi yang besar, anggaran perlindungan buruh migran dalam APBD Kabupaten Banyumas justru kecil. Antara tahun 2014-2018, APBD Kabupaten Banyumas rata-rata mengalokasikan kurang dari 5 Milyar setahun untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM). Kurang dari 2 Milyar di antaranya dialokasikan untuk program perlindungan tenaga kerja dan hanya kisaran 130 juta yang langsung menyentuh program perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tahun Anggaran 2015 misalnya, Dinnakerkop UKM hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 3.062.101.000. Anggaran sebesar ini digunakan untuk melaksanakan 21 kegiatan. Anggaran ini tergolong sangat kecil dibandingkan tingginya tingkat pengangguran dan pekerja yang tidak memiliki kompetensi sehingga sulit berdaya saing mencari kerja diluar daerah.

Tabel 3 menunjukkan program Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas yang terkait langsung bagi perlindungan dan nasib pekerja migran beserta alokasi anggarannya antara 2014-2018. Dari alokasi 1,9 milyar yang diberikan untuk program perlindungan tenaga kerja antara 2014-2018, rata-rata hanya 130 juta yang digunakan langsung untuk perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Tabel 3.

Anggaran Perlindungan Tenaga Kerja Migran di Kabupaten Banyumas

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tahun Anggaran				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	35 juta (425 org)	35 juta (425 org)	35 juta (425 org)	35 juta (425 org)	35 juta (425 org)
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	30 juta (23 PPTKIS)	30 juta (23 PPTKIS)	30 juta (23 PPTKIS)	25 juta (40 PPTKIS)	30 juta (23 PPTKIS)
Fasilitasi penyelesaian kasus CTKI/TKI	100 juta (50 kasus)	100 juta (50 kasus)	100 juta (40 kasus)	66,5 juta (50 kasus)	100 juta (50 kasus)

Sumber: Rencana Strategis Dinnakertranskop UKM Kabupaten Banyumas, 2014-2018 diolah

Disamping alokasi anggaran yang kecil, program perlindungan tenaga kerja seringkali tidak menyentuh langsung problem yang dihadapi para pekerja migran. Banyak dari program bidang ketenagakerjaan bersifat formalistik seperti pelatihan atau sosialisasi. Tindakan lanjut pasca pelatihan seperti pemberian modal dan peralatan kerja masih mendapat anggaran sangat sedikit, itupun dengan serapan yang sangat rendah pula.

Rendahnya anggaran ini berimbas pada terbatasnya kapasitas pemerintah melakukan intervensi penyelesaian masalah yang dihadapi tenaga kerja di luar negeri. Sekarang ini masyarakat membutuhkan inovasi basis migrasi buruh aman dengan cara subsidi dan pemagangan. Terbukti bahwa regulasi yang hanya memaksa masyarakat menggunakan jalur legal menjadi TKI tidak efektif di lapangan. Persoalannya teletak pada tidak adanya subsidi pemerintah dalam menempuh penyaluran TKI aman tersebut. Kebijakan ini sudah sepadan dengan kontribusi TKI sebagai duta devisa negara. Remitensi yang cukup besar ketika mengirimkan uang ke daerah, meningkatkan taraf ekonomi keluarga, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

KESIMPULAN

Gagasan pemberdayaan TKI dengan memperluas partisipasi pemangku kepentingan lokal sebagai pelaku menjadi kunci bagi terciptanya partisipasi tenaga kerja aman. Desa dan kecamatan didorong lebih berperan melalui instrumen kewenangan lokalnya dalam mengontrol penyaluran tenaga kerja ilegal. Langkah pemberdayaan inipun masih sebatas menyentuh aspek kognitif. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi metode migrasi aman dan juga kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha mantan tenaga kerja.

Sudah selayaknya pemerintah melakukan tindakan afirmasi politik anggaran bagi pembiayaan pemberangkatan TKI. Program ini dapat menduplikasi model subsidi pemerintah di sektor lain yang memiliki kesamaan logika kerja. Sebagai contoh petani miskin yang dapat mengakses Kredit Usaha Tani (KUR). Kemampuan produksi petani lebih meningkat, kesejahteraan meningkat tanpa ketergantungan pada rentenir dan tengkulak. Hal serupa bisa direplikasi kedalam logika afirmasi politik anggaran bagi TKI. Pertanyaan besar dari persoalan ini adalah bagaimana mungkin negara dapat dikalahkan oleh calo? Jika calo bisa membangun sistem pembiayaan eksplotitatif dan ilegal kepada TKI kita maka seharusnya negara pun bisa bertindak lebih baik dan lebih terorganisir menyelamatkan TKI kita.

Pola penyelesaian umumnya mengandalkan peran pemerintah sebagai kunci yang dapat mengakselerasi penyiapan tenaga kerja dan lapangan kerja. Disaat yang sama pemerintah belum memiliki banyak inovasi dalam mensiasati tuntutan kerja dengan kapasitas keuangan daerah. Belum termasuk mendalami lebih jauh seberapa profesional manajemen program dan implemtansi program ketenagakerjaan di tingkat kabupaten. Sebagaimana umumnya pemerintah daerah di Indonesia kerap membangun birokrasi Birokrasi perburuhan yang tidak efisien, tidak transparan bahkan eksploitatif. Lebih mengutamakan fungsi regulator daripada fasilitator Rangkaian asumsi ini menarik menjadi pedoman untuk mendalami gap atau kesenjangan yang terjadi antara akar masalah maraknya TKI ilegal dengan logika kebijakan pemerintah daerah.

Dari temuan dan analisis penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Warga yang mengadu nasib menjadi TKI masih berkuat pada system pembiayaan tradisional yang berdampak pada masih maraknya jebakan eksploitasi dan jebakan utang dari rentenir, calo/sponsor.

Masyarakat belum memiliki literasi keuangan yang memadai. Warga belum banyak mengenal program inovasi pemerintah pusat seperti KUR TKI disamping adanya masalah administrative dan kebijakan dilingkup perbankan dan Pemda.

Pemerintah Kabupaten Banyumas belum menginisiasi afirmasi kebijakan bantuan keuangan bagi TKI sehingga warga memiliki harapan tinggi jika tercipta terobosan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AAGN. Ari Dwipayana. 'Politik Anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta'. Makalah disampaikan dalam Diskusi Mengkritisi RAPBD Propinsi DIY Tahun 2002. Jaringan Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik (JANGKEP), Yogyakarta, Senin, 22 April 2002

Chris Maning dan Tadjuddin Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1996)

Evi L. Christinawati, et.al. 'The Role of Networks in International Labour Migration: The Case of Returned Migrants in East Java'. *Journal of Interdisciplinary Economics*, Vol. 25, No. 1/2, p. 95-115, 2013

Graeme Hugo, Forced Migration in Indonesia: Historical Perspective. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 15, No. 1, p. 53-92, 2006

_____, Information, Exploitation and Empowerment: The Case of Indonesian Overseas Workers, *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 12, No. 4, p. 439-467, 2003

_____, Labour Export from Indonesia: An Overview. *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 12, No. 2, p. 275-298, 1995

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007)

Michael Raper, Negara Tanpa Jaminan Sosial: Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia. Trade Union Rights Centre (TURC). Jakarta. 2006.

Michael P. Todaro. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1 Edisi 4. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1994.

Michele Ford, *Workers and Intellectuals: NGOs, Trade Unions and the Indonesian Labour Movement* (Singapore: NUS Press, 2009)

_____, Organizing the Unorganizable: Unions, NGOs, and Indonesian Migrant Labour. *International Migration*, Vol. 42, No. 5, p. 99-119. 2004

Nurchayati, 'Bringing Agency Back in: Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia', *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 20, No. 3/4, p. 479-502, 2011

Pratikno, Purwo Santoso, et.al. *Mengelola Dinamikan Politik dan Sumberdaya Daerah* (Yogyakarta: Global Media, 2004).

Pratikno, Proses Politik Perumusan Kebijakan Anggaran Daerah. Makalah Lokakarya DPRD Kabupaten Banjarnegara, 14 April 2003.

Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Gramedia, 2006).

Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008)

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta : Rajawali Pers, 1999)

Vedi R. Hadiz, *Workers and the State in New Order Indonesia* (London: Routledge, 1997)

_____, Reformasi Total? Labor After Soeharto. *Indonesia*, 66, p. 109-124. 1998

Dokumen:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banyumas Akhir Tahun Anggaran 2015 (LKPJ).

Website:

BeritaSatu.com Pengangguran di Indonesia. Hak Cipta © Van der Schaar Investments B.V. diakses: 2 Oktober 2016.

Pusat Sumber Daya. BURUH MIGRAN. www.buruhmigran.or.id. Dinsosnakertrans Banyumas Siap Perbaiki Tata Kelola Informasi Posted on 23 September 2014. Diakses tgl. 2 Oktober 2016

Media Massa:

Banyumas basis wilayah TKI (Radar Banyumas jumat kliwon 27 maret 2015)
Harian Banyumas, 24 September 2014. Lintas Daerah: TKI lebih percaya calo. Wonosobo. Satelit Post. Kamis 12 Juni 2014. Uang Kiriman TKI Capai Rp. 451,51M.